

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII, 2009)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum Dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dan Warga Negara*, (Banjarbaru : Thema Publishing, 2021)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 1997)
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2011)
- \_\_\_\_\_, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung : Refika Aditama, 2017)
- \_\_\_\_\_, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011)
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008)
- Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018)
- H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

- Hukumonline.com, *101 Kasus & Solusi Tentang Perjanjian*, (Tangerang : Kataelha, 2010)
- J Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014)
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021)
- Mariam Darus Badruzaman, *et.al, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung : Mandar Maju, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Pieter Latumeten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accesoir*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018)
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013)
- Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012)
- Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Kencana, 2012)

\_\_\_\_\_, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Verawati Br Sitompul, *Buku Mengajar Hukum Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2017)

Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Cetakan 1, (Jakarta : Milenia Populer, 2004)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

#### **B. Jurnal :**

Agus Budianto, “*Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science*”, *International Journal of Criminology and Sociology*, Volume 9, 2020. DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>

Andi Pratono, “Sanksi Yang Diterima Oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Cacat Hukum (Studi Putusan: PN JAKSEL NO. 124/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, Nomor 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6535>

Arie Lestario dan Erlina, “Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia”, *Notary Law Jurnal*, Volume 1, Issue 1, 2022. DOI : <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.1>

Christiana Sri Murni, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah”, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23384>

Clara Vania dan Gunawan Djajaputra, “Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 2, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2747>

Dewi Kurnia Putri dan Amin Purnawan, “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, 2017

Hadi Haerul Hadi dan Safiulloh, “Pembatalan Oleh Hakim Terhadap Akta Jual Beli Yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2022. DOI : <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.43>

- I Ketut Gede Purnayasa, *et.al*, “Pengenaaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3994.519-524>
- I Putu Surya Wadi Putra, *et.al*, “Pengaturan Pengenaan Pajak dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.204-208>
- Nuridin dan Muhammad Wildan, “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli”, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.91>
- Made Ara Denara Asia dan I Made Dedy Priyanto, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2019
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- M. Jamil, “Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris”, Jurnal Bestuur, Volume 7, Nomor 2, 2019
- Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai *Intelectual Dader* Dibidang Perpajakan Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, Jurnal Education and development, Volume 9 Nomor 4, 2021.
- Raymond Aristyo, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 9, Nomor 12, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p13>
- Sibuea Mia Augina Romauli, *et.al*, “Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparisi”, Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p137-159>
- Suhardi Somomoeljono, “Pembatalan Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Res Justitia, Volume 1, Nomor 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.11>

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

#### **D. Putusan :**

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Srh

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 24/Pdt/2022/PT MDN

Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 1572 K/PDT/2023

**E. Website :**

Kompas.com, “Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana?page=all> , diakses pada 14 Januari 2024

**F. Wawancara :**

Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Kota Depok, via Zoom Meeting, Tanggal 05 November 2023, Pukul 19.40 WIB.

